

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip ini memperhatikan aspek demokrasi, partisipasi, adil dan merata dengan tetap mempertahankan aspek demokrasi, partisipasi, adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Berdasarkan asas tersebut, diharapkan otonomi daerah mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah. Kesejahteraan masyarakat memang menjadi tujuan utama dari kebijakan otonomi sebagaimana tuntunan pada saat reformasi digulurkan. Tujuan tersebut hanya dapat terwujud dengan adanya pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Otonomi daerah yang sudah berjalan beberapa tahun ini telah mengalami berbagai perbaikan yang di tunjukan dengan berbagai perubahan dasar hukum yang mendasarinya, melalui dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalaui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan perubahan-perubahan tersebut telah

membuktikan bahwa pembenaan sistem pemerintah daerah terus berjalan dinamis seiring dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Diberlakukannya kedua perundang-undangan di atas telah menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaku utama dalam implementasi kebijakan dan pembangunan ekonomi. Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah tersebut akan dapat terlaksana secara optimal bila dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang mana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa; kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada didaerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Adanya hak-hak untuk mendapatkan berbagai sumber keuangan tersebut diharapkan pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan

Negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya agar mampu menjadi daerah otonom yang mandiri.

Kemampuan pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan. APBD adalah instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pembangunan kapabilitas, efisiensi, dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Anggaran sebagai instrument kebijakan dan memiliki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan yang berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran.

Untuk menganalisis kinerja atau kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dilakukan dengan menganalisis peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap struktur penerimaan APBD, dengan

cara menghitung Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian. Kemudian untuk mengetahui perkembangan APBD dapat dilakukan dengan cara menghitung Rasio Pertumbuhan.

Rasio kemandirian menggambarkan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) yang terdiri dari bagi hasil pajak, Bagi Hasil bukan Pajak, Dana Alokasi umum, Dana alokasi Khusus, dan Pinjaman.

Rasio efektivitas dan Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.

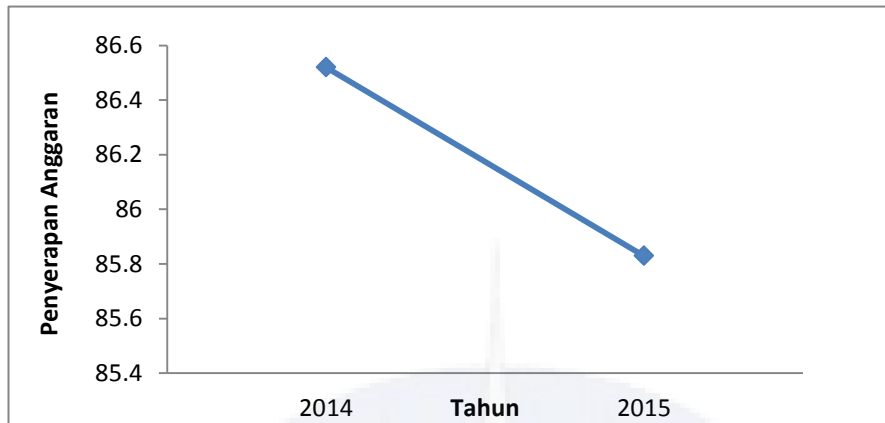
Rasio Keserasian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan. Sedangkan perkembangan APBD diukur dengan Rasio Pertumbuhan. Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.

Penulis melihat masih ada peluang untuk melakukan penelitian mengenai kemampuan keuangan daerah dengan objek Pemerintah Kabupaten lainnya, yaitu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, berdasarkan data penelitian tersebut. Kabupaten Bangka Selatan adalah salah satu daerah

pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Belitung Timur. Sebagai Kabupaten yang baru terbentuk Kabupaten Bangka Selatan diharapkan akan mampu membangun daerahnya hingga menjadi daerah otonom yang mandiri. Sejalan dengan itu pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam mendukung pembangunan daerahnya melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dana dari berbagai sumber untuk dapat meningkatkan PAD antara lain dengan melakukan pendataan obyek pajak di wilayah Kabupaten Bangka Selatan yang memiliki potensi (diantaranya dari sektor jasa seperti reklame dan lainnya). Pendataan dilakukan sebagai langkah awal dalam upaya meningkatkan pemasukan daerah, baik dari pajak maupun retribusi daerah.

Lambatnya penyerapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan jika dilihat dari sisi Keuangan belum adanya pencairan, selain itu adanya beberapa proyek yang cenderung bermasalah seperti proyek yang tidak selesai pengerjaannya atau diputus kontraknya dan Lambatnya dalam pelaksanaan dan kegiatan dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Gambar I.1 Daya serap APBD



Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Bangka Selatan

Berdasarkan dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran belanja daerah pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2015 sebesar 85,83 persen atau sebesar Rp.850.734.950.833, sedangkan pada tahun 2014 penyerapan anggaran belanja daerah sebesar 86,52 persen atau sekitar Rp.633 miliar. Jadi dapat disimpulkan daya serap anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,69 persen. (Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bangka Selatan,2016).

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan dalam rangka penelitian untuk skripsi maka penulis memilih judul “**Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah**”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu;

1. Bagaimana tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bangka Selatan dilihat dari peran PAD terhadap struktur penerimaan APBD dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas dan Efisiensi dan Rasi Keserasian selama periode 2011-2015?
2. Bagaimana tingkat perkembangan APBD dilihat dari rasio pertumbuhan selama periode 2011-2015?

1.3 Batasan Masalah

Masalah Penelitian ini dibatasi hanya untuk menganalisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun anggaran 2011-1015 yang ditekankan pada APBD dan dihitung dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk;

1. Menganalisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka selatan dilihat dari Peran PAD terhadap Struktur Penerimaan APBD dalam Pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas dan Efisiensi dan Rasio Keserasian selama periode 2011-2015.

2. Mengetahui tingkat perkembangan APBD Kabupaten Bangka Selatan selama periode 2011-2015

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi 3 manfaat yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat kebijakan.

1. Manfaat teoritis :

Bagi Pemerintah Daerah dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah sehingga dapat menjadi dasar dalam membuat kebijakan dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahan referensi dan informasi bacaan dalam mengetahui peranan PAD terhadap struktur penerimaan APBD serta perkembangan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumber masukan berupa saran atau pemikiran baru dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan di masa yang akan datang sehingga dapat membantu pembangunan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

3. Bagi Kebijakan

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi pemerintah kabupaten Bangka Selatan Khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam memberikan kebijakan dan keputusan secara optimal. Penelitian ini juga diharapkan menambah

referensi untuk penelitian selanjutnya dan bahan bacaan untuk menambah wawasan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika Penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang membahas tentang Manajemen keuangan, otonomi daerah, daerah otonom, kemampuan keuangan daerah, dan berisi tentang hasil penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan pendekatan penelitian, tempat penelitian, populasi dan sample, metode pengumpulan data, definisi operasional variable dan metode analisi data.

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum kabupaten Bangka Selatan, demografis, indeks pembangunan Manusia(IPM), Visi dan Misi, Struktur Organisasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi keuangan dan pembangunan daerah serta membahas tentang analisis data dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil analisi data dan saran-saran yang diberikan dari penulis yang diharapkan dapat berguna bagi pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam membangun daerahnya.

